

INTERAKSI SIMBOLIK UNTUK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. Razak ^{1*})

¹ Dosen, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

*Corresponding Author

Email: razakalkadrie@yahoo.co.id

Abstract

This research is important, especially to explore further the behavioral aspects behind the budget. Researchers want to get a more real and definite picture of who is behind the power in the process of preparing the Regional Government budget. how their life and behavior; how they think and make decisions; as well as other people around them. All of these aspects may very well influence the behavior of the executive and legislature in the practice of decision-making in the process of drafting the Regional Government budget that has been running so far. Based on the problems above, the goal to be achieved is "understanding the behavior of the executive and legislature in the process of preparing the Government budget" and the importance of understanding symbols when someone uses Symbolic Interaction theory. Symbols are social objects in an interaction. It is used as representation and communication which is determined by the people who use it. These people give meaning, create and change the object in the interaction. These social symbols can be in the form of physical objects (objects that are visible to the eye), words (which are used to represent physical objects, feelings, ideas, etc.), and actions (whatever people do). often gives meaning to communicate with others).

Keywords: *social object, interaction, symbolic interaction, behavior*

1. PENDAHULUAN

Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Penentuan skala prioritas dalam penyusunan anggaran dipengaruhi oleh perilaku manusia serta *frame of reference* (kerangka acuan) yang melatarbelakanginya. Berkaitan Riset-riset tentang aspek keperilakuan telah dilakukan sejak tahun 1950-an. Dimulai dari riset oleh Argyris pada tahun 1952 hasil telaahnya menghubungkan akuntansi dengan aspek keperilakuan. Dengan demikian bidang akuntansi tidak hanya merupakan bagian dari dunia empiris, tetapi dibentuk oleh kepentingan dan latar belakang teoretis yang dimiliki oleh peneliti.

Sebagai seorang yang memainkan suatu peranan sosial dalam masyarakat, peneliti terikat kepada norma-norma, aturan-aturan tertentu dan keyakinan, pandangan dan sikap dari informan (Muhadjir, 2000:12). Semua hal tersebut, dapat langsung mempengaruhi perasaan, keyakinan, pandangan dan sikapnya sendiri, sehingga dapat mempengaruhi sifat dari data yang dikumpulkan dan fakta-fakta yang ditanyakan. Kendati demikian, disadari bahwa pekerjaan untuk menghubungkan data dengan teori dalam rangka menganalisis data dan menjawab pertanyaan penelitian tampaknya menuntut kearifan yang luar biasa.

Penelitian ini menjadi penting, terutama untuk menggali lebih jauh aspek keperilakuan di balik anggaran. Karena diharapkan dapat membuka tabir seluk

beluk dari anggaran dipandang sebagai “peluang” yang tidak saja dalam fenomena konsepsi tetapi juga dapat dirasakan. Dengan demikian diharapkan dapat menjelaskan hubungan yang sesungguhnya antara manusia dan anggaran sebagai refleksi watak pemimpinnya.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini mengkaji mengenai perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memperoleh gambaran yang lebih nyata dan pasti mengenai siapa di balik kekuasaan dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah itu, bagaimana kehidupan dan perilaku mereka; bagaimana mereka berpikir dan mengambil keputusan; serta orang-orang lain di sekitar mereka. Kesemua aspek itu mungkin saja sangat berpengaruh pada perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam praktik pengambilan keputusan proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah yang selama ini berjalan.

Satu hal yang ingin peneliti tekankan, bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana struktur pembuatan “praktik kebijakan” dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah melalui tahapan yang strategis dalam menghasilkan Output berupa APBD. Tahapan yang strategis ini penuh dengan dinamika para aktor dalam pemahaman interaksi di balik “kebijakan politik” yang diambil dari sudut pandang pelaku sendiri yang terlibat. Sesungguhnya output yang dihasilkan berupa APBD, merupakan hasil kesepakatan dan kompromi dari kedua aktor utama proses penyusunan anggaran daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah Bagaimana perilaku

eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan?

Sehubungan dengan proses dan permasalahan di atas bahwa realitas adalah hasil perekayasa manusia (*reality is a human engineering*) yang diciptakan melalui interaksi sosial (*social interaction*). Realita dalam interaksi sosial itulah yang dapat menimbulkan berbagai problema antara lain problema sosial, etika, norma, keadilan, kepentingan, konsep dan transparan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan melakukan perekayasa lingkungan dunia di sekitar mereka dengan menggunakan induktif analitik. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai “memahami perilaku eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran Pemerintah”.

2. KAJIAN LITERATUR

Dalam perkembangannya riset-riset akuntansi keperilakuan cenderung menggunakan asumsi yang berbeda dengan yang digunakan oleh aliran-aliran lainnya. Aliran-aliran tersebut ternyata telah mampu membawa akuntansi keluar dari belenggu *positivist paradigm*. Kemampuan tersebut mulai memfokuskan diri dengan menekankan pada aspek sosial dan fungsi utama akuntansi sebagai media simbolis dan realitas sosial. Akuntansi termasuk didalamnya anggaran adalah bagian dari ilmu sosial. Upaya untuk memahami perilaku manusia secara sistematis, termasuk juga upaya untuk memprediksinya perlu dilakukan melalui aliran sosiologis (Defleur, 1971:2). Pendekatan sosiologis selalu tertarik pada upaya mencari tahu tentang sebab-sebab individu melakukan suatu tindakan (Charon, 1995:20-21; dan Nagel, 1961:19).

Burrell dan Morgan (1979) membuat suatu pemetaan paradigma sosiologis yang dapat membantu kita memahami

“cara pandang” berbagai aliran dan teori ilmu sosial. Peta yang digunakan dengan menempatkan empat pandangan yang berbeda mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat yang didasarkan pada anggapan-anggapan meta-teoretis. Paradigma tersebut terdiri dari humanis radikal, strukturalis radikal, interpretatif, dan fungsionalis. Keempat paradigma ini merupakan cara mengelompokkan kerangka berpikir seseorang dalam suatu teori sosial dan alat untuk memahami mengapa pandangan-pandangan dan teori-teori tertentu dapat lebih menampilkan sentuhan pribadi dibanding yang lain. Demikian juga alat untuk memetakan perjalanan pemikiran seseorang mengenai teori sosial yang digunakan dalam memecahkan persoalan sosial.

Teori sosial yang digunakan dalam ilmu pengetahuan (*knowledge*) dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis yang memiliki dasar berpikir tentang ontologi dunia sosial (*realisme vs nominalisme*), epistemologi (*positivisme vs anti-positivisme*), aksiologi (baik vs buruk), sifat (hakikat) manusia (*determinisme vs voluntarisme*), dan metodologi (nomothetik vs ideografik) (lihat Burrell dan Morgan, 1979; Chua, 1986:603; Suriasumantri, 2003:105). Dasar berpikir tentang ontologi ini berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang akan diinvestigasi. Sementara epistemologi berhubungan dengan sifat dari ilmu pengetahuan, bentuk dari ilmu pengetahuan tersebut, dan bagaimana mendapatkan serta menyebarkannya. Epistemologi memberikan perhatian terhadap bagaimana cara untuk menyerap ilmu pengetahuan dan mengomunikasikannya. Dengan demikian, maka yang harus disadari adalah bahwa sudut pandang seseorang terhadap realitas (ontologi) akan mempengaruhi bagaimana ia memandang sesuatu hal yang pada akhirnya mempengaruhi cara di dalam

memperoleh, mengkonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara benar (epistemologi).

Apabila kita mengacu pada epistemologi tersebut, maka sekaligus akan menyadarkan kita tentang kemungkinan adanya perbedaan dalam memahami dan memaknai ilmu pengetahuan. Perbedaan dalam memahami dan memaknai ilmu pengetahuan disebabkan oleh adanya berbagai paradigma dalam hal ontologi, aksiologi dan bahkan epistemologi itu sendiri. Perbedaan dalam ontologi dan aksiologi, akan menimbulkan perbedaan dalam epistemologi. Epistemologi yang menyebabkan (perlunya) perbedaan paradigma, yang kemudian melahirkan berbagai metode dan 21 paradigma. Dengan demikian, metode dan paradigma akan mempengaruhi metodologi untuk mencapai tujuannya dalam menemukan, mengkonstruksi dan mengembangkan serta membangun ilmu pengetahuan.

Metodologi untuk mencapai tujuan dalam setiap paradigma memiliki karakter yang berbeda dan unik. Karakter ini secara implisit menginformasikan bahwa satu paradigma tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan semua persoalan keilmuan dan persoalan praksis. Karena masing-masing paradigma dengan kekhasan yang dimilikinya hanya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu saja. Artinya bahwa penggunaan paradigma tertentu akan menghasilkan suatu kesimpulan tertentu, sehingga akan berbeda hasil kesimpulannya apabila menggunakan paradigma yang lain. Dengan demikian, kedudukan paradigma dalam penelitian realitas sosial menjadi satu hal yang penting.

Paradigma ibarat sebuah jendela yang digunakan untuk mengamati dunia luar dengan wawasannya atau dengan kata lain paradigma digunakan untuk dasar berpijak. Paradigma adalah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota

suatu masyarakat sains, dan sebaliknya, masyarakat sains terdiri atas orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama (Kuhn, 1962:171; lihat juga Etzioni, 1988:1). Selain itu juga, paradigma dapat didefinisikan sebagai sejumlah proposisi yang menjelaskan bagaimana dunia dihayati; mengandung pandangan mengenai dunia, suatu cara untuk memecah-mecah kompleksitas dunia nyata, menjelaskan apa yang penting, apa yang memiliki legitimasi, dan apa yang masuk di akal (Adiprigandani, 2005:2).

Maliki (2004:15) berpendapat bahwa paradigma merupakan unit konsensus yang amat luas dalam ilmu pengetahuan dan dipakai untuk melakukan pemilahan masyarakat ilmu pengetahuan (sub masyarakat) yang satu dengan masyarakat ilmu pengetahuan yang lain". Artinya bahwa paradigma adalah suatu cara pendekatan yang digunakan dan diyakini oleh suatu kelompok tertentu dalam suatu perspektif intelektual untuk mendapatkan suatu kebenaran (*truth*) atau dalam membangun suatu teori. Dalam melihat kebenaran, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran.

Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberikan makna realitas sosial (Faqih, 2001:19). Realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan manusia, sehingga kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi yang berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Manusia bukan sebagai sosok pasif

yang begitu saja merespon stimuli di lingkungannya, melainkan sosok yang aktif dan dinamis (Shibutani, 1986:10; dan Charon, 1999:32). Di sisi lain manusia tidak saja mampu berbuat, tetapi juga merefleksikan perbuatan yang sudah dilakukannya dan perbuatan orang lain serta menimbang kemungkinan tindakan-tindakan alternatif lain (Gusfield, 1983). Pandangan yang sama dikemukakan oleh Blumer (1969:1) bahwa manusia sesungguhnya sosok yang aktif dan dinamis dengan kemampuan bernalar (*reasoning*) dan dapat menciptakan realitas sosial atau dunianya melalui pemberian sistem makna. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya. Dengan demikian, manusia dalam banyak hal memiliki kesadaran dan kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya, di mana individu berasal.

Kesadaran dan kebebasan sebagai individu berkaitan erat dengan lingkungan masyarakat lebih mengarah kepada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif sebagai sebuah realitas sosial mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku manusia, sehingga akan mempengaruhi para pelaku dalam pengambilan keputusan di balik 'praktik kebijakan' anggaran daerah. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam penentuan paradigma penelitian ilmu sosial.

Penentuan paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif menekankan bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memahami realitas dunia apa adanya, dalam beberapa hal paradigma ini juga disebut sebagai paradigma konstruktif (Ludigdo, 2006: 52). Burrell dan Morgan (1979) menggambarkan sifat interpretif sebagai paradigma yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia

sosial yang tidak terlepas dari kacamata personal yang terlibat langsung dalam sebuah proses sosial. Muhadjir (2000:119) berpendapat bahwa paradigma interpretif adalah paradigma yang melakukan aktivitas untuk mencari makna bukan untuk mencari hukum serta berupaya untuk memahami bukan untuk mencari teori. Kedua pendapat tersebut, menunjukkan bahwa paradigma interpretif memahami bentuk fundamental dari dunia sosial pada level pengalaman subjektif seseorang.

Paradigma ini mencari penjelasan dalam realisme tentang subjektivitas dan kesadaran individu, dalam kerangka acuan mengenai partisipan berhadapan dengan peneliti mengenai tindakan. Cara yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyelidikan dengan mendatangi subjek yang hendak diteliti dalam setting alami. Peneliti datang ke tempat di mana subjek yang hendak diteliti, mengamati dan berinteraksi dengan aktor sosial (eksekutif, legislatif dan masyarakat) dalam waktu yang relatif panjang. Hasil dari pengamatan dan berinteraksi ini, maka peneliti memperoleh data yang cukup, kemudian secara sistematis melakukan analisis dengan menggunakan metode yang tepat dan selanjutnya menginterpretasikannya. Setelah peneliti melakukan semua langkah-langkah tersebut, kemudian melaporkannya sesuai dengan data atau fenomena yang diperoleh di lapangan. Dasar pemikiran peneliti menggunakan paradigma interpretif karena lebih menekankan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman akan makna dari realitas yang diturunkan dari wawasan filosofi Jerman (lihat Chua, 1986). Burrell dan Morgan (1979) berpendapat bahwa paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis dari paham nominalism yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak lain adalah label, nama atau konsep yang digunakan untuk

membangun realitas. Atas dasar inilah, para nominalis memandang bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang nyata. Akibatnya, nama-nama hanya dianggap sebagai kreasi artifisial yang kegunaannya tergantung pada kecocokannya untuk mendeskripsikan, memberi arti, dan menegosiasikan sesuatu atau dunia luar (*external world*).

Triyuwono (2006:231) berpendapat bahwa paradigma interpretivisme memandang bahwa manusia adalah makhluk aktif (mempunyai *free-will*) yang menciptakan dunianya (realitas sosial) sendiri, memberikan makna terhadap dunianya, menciptakan sistem makna, dan menganggap dirinya tidak dibatasi oleh hukum eksternal. Berdasarkan pada asumsi ini akhirnya realitas sosial dipandang sebagai entitas yang subjektif, diciptakan (tidak ditemukan), dan diinterpretasikan. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa ilmu pengetahuan yang dibangunnya secara *common sense* saja, namun bersifat induktif, ideografik, menekankan pada makna dan tidak bebas nilai. Secara definitif, peneliti mengartikan penelitian dengan paradigma interpretif lebih mendekati pada pemahaman bentuk fundamental dari dunia sosial pada tingkat pengalaman subjektif seseorang.

Paradigma interpretif bertujuan untuk mengetahui aktualisasi, realitas sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat diungkapkan dalam penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Secara ontologi paradigma interpretif menuntut pendekatan holistik, mendudukan objek penelitian dalam suatu konstruksi ganda dan melihat objek dalam konteks natural bukan parsial. Pada sisi lain, dalam aspek epistemologinya menuntut bersatunya objek penelitian dengan subjek pendukung objek penelitian. Dengan kata lain hubungan

peneliti dengan objek bersifat interaktif melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial.

Pengamatan dilakukan dalam setting yang alamiah agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial tersebut menciptakan dunia sosial dan memeliharanya. Keterlibatan dan penghayatan subjek peneliti di lapangan sangat menentukan keberhasilan ini, serta menolak rerangka teori sebagai persiapan penelitian. Rerangka-rerangka epistemologis dalam paradigma interpretif, khusus untuk menjelaskan gejala-gejala perilaku kemanusiaan yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan positivistik empiris. Gejala-gejala perilaku khusus manusia yang bersifat unik itu memang einmalik dan ideografik. Para pakar pendekatan interpretif berpendapat bahwa tingkah laku manusia dalam konteks sosial hanya dapat dipahami melalui pemahaman yang mendalam terhadap makna yang diberikan oleh individu manusia itu sendiri. Hanurawan (2005) berpendapat bahwa gejala-gejala perilaku manusia dapat dijelaskan secara memadai, apabila peneliti dapat memahami secara mendalam makna perilaku itu berdasarkan pada sudut pandang subjektif partisipan penelitian. Secara aksiologi, paradigma interpretif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol.

Simbol berisikan nilai, sehingga nilai ini timbul melalui manusia dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam pergaulan. Manusia-manusia yang saling berinteraksi dan terikat oleh kebudayaan yang sama merupakan masyarakat. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Sehubungan dengan keberadaan manusia memiliki dua dunia sekaligus, yaitu fenomen dan noumena, maka paradigma interpretif mengakui empat kebenaran terdiri dari kebenaran empirik sensual,

kebenaran empirik logis, kebenaran empirik etik, dan kebenaran empirik transendental (Mantra, 2004:25-6). Dalam kegiatan penelitian, peneliti interpretif harus memiliki pemahaman terhadap tiga konsep dasar sebagai substansi penelitian. Tiga konsep dasar ini bertujuan untuk menjelaskan gejala tingkah laku manusia, yaitu intersubjektifitas, motif dan alasan dasar yang terkandung dalam perilaku seseorang (Candy, 1989). Berkaitan dengan ketiga konsep dasar di atas sebagai "pintu gerbang" keberhasilan dalam paradigma interpretif, untuk menjelaskan gejala tingkah laku manusia berdasarkan pada pemberian makna secara subjektif oleh partisipan penelitian.

Intersubjektifitas mengacu pada kesepakatan antar subjek tentang peristiwa atau kondisi-kondisi sosial yang memberi semacam rerangka bagi keabsahan kebenaran pengetahuan. Motif adalah suatu keadaan yang melatarbelakangi timbulnya peristiwa atau keadaan lain. Hanurawan (2005) berpendapat bahwa semua itu memberikan dasar alasan adalah harapan-harapan yang memberi pengaruh bagi perilaku seseorang di masa yang akan datang. Fenomena yang ada dapat dirumuskan dalam ilmu pengetahuan dengan memperhatikan gejala atau hubungan yang ada di antara keduanya. Hubungan tersebut yang hasilnya akan sangat subjektif, sehingga penelitian ini tidak bersifat bebas nilai (*not value free*). Pandangan paradigma interpretif ini menjelaskan bahwa penelitian merupakan bangunan dasar dari sebuah proses konstruksi ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan merupakan dasar untuk menjelaskan kehidupan, kejadian sosial dan memahami manusia, melalui suatu common sense yang mengandung makna atau sistem makna, yang dapat digunakan oleh suatu masyarakat untuk memaknai kehidupan mereka. Ilmu pengetahuan menurut paradigma

interpretif bukan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi sebagaimana dalam ilmu pengetahuan yang dibangun oleh para fungsionalis atau para positivis tetapi untuk memahami suatu realitas (*to understand*). Konteks di atas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bagi paradigma interpretif tidak digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi untuk memahami. Oleh sebab itu untuk melakukan pemahaman, paradigma interpretif menggunakan *inductive approach*. *Inductive approach* yaitu dari sesuatu yang khusus kepada yang umum atau dari sesuatu yang konkrit kepada yang abstrak. Dalam konteks ini tidak bisa diartikan mencari generalisasi, tetapi lebih tepat diartikan sebagai pemahaman dari sesuatu yang empirik dan khusus kepada pemahaman yang lebih abstrak melalui proses pemaknaan. Semua berkembang bagaikan gelombang laut yang mengikuti pergerakan arah angin. Artinya, bahwa proses pemaknaan itu sendiri tidak sekedar menggunakan indra, tetapi yang lebih penting adalah pemahaman makna dan interpretasi dari realitas sosial yang sedang dikaji (Sarantakos, 1993). Dalam paradigma interpretif Burrell dan Morgan (1979) mengemukakan bahwa teori tumbuh karena adanya fakta di lapangan yang sudah diamati dengan melihat interaksi tersebut, sehingga teori atau hipotesis tidak perlu dibuat sebelumnya seperti pada paradigma fungsionalis atau positivis. Pengumpulan data pada paradigma ini dilakukan melalui proses dialog dengan aktor sosial atau informan untuk memaknai realitas sosial yang ada dan lebih memfokuskan pada konstruksi, rekonstruksi dan elaborasi dalam suatu proses sosial.

3. METODE PENELITIAN

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa penelitian ini

menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik sebagai metodenya. Interaksi simbolik merupakan pendekatan induktif untuk memahami perilaku manusia (Wallace & Wolf, 1986: 218). Kaum interaksionis percaya bahwa diskripsi mendalam mengenai interaksi sosial seharusnya menjadi tujuan pokok ilmu-ilmu sosial (Charon, 1998: 212). Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang makna di balik setiap interaksi yang terjadi, proses individu merumuskan situasi dan makna objek sosial yang dihadapinya (lihat Freund, 1969:94; Muhadjir, 2000:190-1; Triyuwono, 2000:115-7).

Selanjutnya, Blumer (1969:1) menyatakan bahwa Interaksi simbolik merupakan suatu perspektif ilmiah untuk memahami kehidupan masyarakat dan perilaku manusia. Perspektif ini berdasarkan pandangan bahwa manusia adalah sosok yang aktif dan kreatif, senantiasa terlibat dalam interaksi sosial dengan orang-orang atau lingkungannya, disamping dengan diri sendiri. Setiap tindak (*action*) yang dilakukannya selalu didasarkan atas keputusan yang diambil saat itu. Keputusan mana didasarkan atas pemahaman makna objek atau definisi situasi tempat tindakan berlangsung. Dengan demikian, makna objek dan definisi situasi diperoleh dari hasil interaksi individu dengan diri-pribadi, dan dengan orang lain yang juga mempunyai kepentingan dengan objek tersebut.

Hasil interaksi dengan diri-pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain konsep diri (*self-concept*), pengalaman masa lalu (terhadap objek yang sama), dan tujuan. Faktor-faktor tersebut akan menentukan tindakan individu baik secara perorangan maupun kolektif atau mewakili suatu organisasi, selalu berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Orientasi tersebut, di satu sisi interaksi dengan "*the signifikan others*" juga sangat berperan dalam pembentukan

makna, sebab dari interaksi itu dapat dihasilkan perspektif. Oleh karena itu, dengan perspektif yang telah dimiliki, maka makna objek kemudian dipahami.

Sisi lain interaksi sosial, interaksi dengan diri-pribadi, perspektif dan tujuan merupakan faktor-faktor yang dapat memfasilitas definisi situasi atau makna objek yang selanjutnya sangat menentukan tindakan. Kecuali itu, ada pula faktor-faktor yang bisa menghambat tindakan, seperti struktur sosial, kekuasaan, peran dan kebudayaan. Dengan demikian, setiap tindakan individu mau tidak mau harus memperhitungkan faktor-faktor eksternal itu agar tidak melahirkan konflik sosial.

Dalam penelitian ini interaksi simbolik (peneliti) berhubungan dengan bagaimana para eksekutif dan legislatif (komunitas) menginterpretasikan tiap isyarat pihak lain dan melakukan aktivitas berdasarkan makna dan hasil interpretasi dari isyarat tersebut (Burrell dan Morgan, 1979:78). Proposisi paling mendasar dari interaksi simbolik adalah perilaku dan interaksi manusia itu dapat dibedakan karena ditampilkan lewat simbol dan maknanya. Simbol merupakan aspek penting yang memungkinkan orang bertindak menurut cara-cara yang khas dilakukan manusia.

Selain itu juga, perspektif interaksi simbolik dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami sifat interaksi dalam masyarakat, yakni sebagaimana dikemukakan Charon (1979:23) bahwa aktivitas sosial yang secara dinamis terjadi di antara individu-individu. Individu juga sebenarnya memiliki kehendak (*will*) dan kemampuan untuk menganalisis situasi, mempertimbangkan segala alternatif yang ada dan masing-masing konsekuensi bisa ditimbulkannya, serta mengambil keputusan untuk bertindak. Dalam interaksi individu-individu biasa mengalami perubahan, bertindak satu sama lain, saling mempertimbangkan,

bertindak, berpersepsi, menginterpretasi, dan kemudian bereaksi. Hal ini sejalan dengan pendapat Mead (1934/1972) menyatakan bahwa manusia itu membentuk wawasan melalui proses sosial. Melalui proses sosial mereka mampu melakukan tindakan, memperhatikan dan menginterpretasikan tindakan sosial sebelum bertindak. Disamping sebagai subjek juga dapat menjadi objek dari perbuatannya sendiri, persis seperti ia bertindak terhadap objek sosial lainnya karena manusia memiliki "diri" yang merupakan sentral bagi perspektif interaksionisme simbolik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus mengenai kebijakan publik sering menjadi pertentangan sengit. Hal ini disebabkan karena proses penetapan kebijakan tersebut tidak diketahui oleh kalangan luas. Sebagaimana kita ketahui, di masyarakat luas sering kita dengar anggapan adanya kebijakan yang lahir dengan tidak berdasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat atau dasar pertimbangan rasional. Menurut Ayuningtyas (2008:18), kenyataan ini lahir karena proses kebijakan itu sendiri adalah bagaikan "kotak hitam" bagi masyarakat luar. Ia kemudian merujuk pada teori analisa kebijakan publik, yang pada intinya menganggap bahwa sebuah kebijakan merupakan refleksi faktor-faktor kekuasaan dan politik, serta perilaku penentu kebijakan. Anderson (1969:13-15) berpendapat bahwa faktor-faktor yang disebutkan itu memungkinkan terjadinya tarik-menarik kepentingan, interaksi kekuasaan, alokasi sumber daya dan bargaining position antara aktor yang terlibat dalam sebuah kotak hitam penetapan produk kebijakan. Implikasinya, produk-produk kebijakan yang dihasilkan oleh para elit tersebut akan lebih mengakomodasi kepentingan elit ketimbang kepentingan rakyat banyak.

Setiap produk kebijakan yang dibuat pemerintah sesungguhnya harus dikembalikan pada publik untuk menilainya. Di antara berbagai macam kebijakan pemerintah dengan segala produknya itu, hal yang paling penting adalah yang berkaitan dengan anggaran. Pentingnya hal tersebut, karena melalui kebijakan anggaran itulah segala macam pemenuhan kebutuhan masyarakat mendapat legitimasinya. Dalam konteks disiplin ilmu akuntansi, pemahaman kebijakan anggaran berangkat dari pendekatan normatif, di mana kebijakan anggaran dibatasi oleh situasi pengambilan keputusan yang didefinisikan dalam berbagai variabel (*variables*), asumsi (*assumptions*) dan kendala (*constraints*) serta tujuan (*objectives*), sehingga pandangan *neo-classical* terhadap organisasi dan perilaku manusia sedikit sekali diungkapkan (lihat Scapens dan Arnold, 1986; Scapens, 1991; Ryan et. al., 2002). Artinya, tidak ada pertimbangan yang cukup terhadap konteks organisasi di mana kebijakan anggaran beroperasi. Hal lain yang diabaikan oleh pendekatan akuntansi tradisional adalah potensi konflik yang mungkin terjadi dalam organisasi, serta kemungkinan terjadinya asimetri distribusi kekuasaan antara tujuan dan perilaku. Kekeliruan ini, menurut Morgan (1986:44) adalah karena akuntansi lebih didasarkan pada metafora mekanistik atas organisasi. Hasil pemikiran itu tercermin dalam anggaran yang mereka susun sebagai realitas sosial sangat ditentukan oleh sikap mental dan moralitas mereka.

Realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan manusia, sehingga kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi yang berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya, di mana individu berasal.

Dalam membahas struktur sosial, dikenal dua konsep penting yaitu status dan peran (*role*). Linton (1968:358) mendefinisikan kedua konsep tersebut sebagai berikut status adalah “*a collection of rights and duties*” (suatu kumpulan hak dan kewajiban), sedangkan peran adalah “*the dynamic aspect of a status*”. Menurut Linton seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam penentuan paradigma penelitian ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan berusaha mencari penjelasan tentang kehidupan manusia, khususnya tentang kausaliteit kehidupan sosial (Charon, 1998:15-17). Tujuan ilmu-ilmu sosial adalah untuk mengungkapkan kausaliteit kehidupan sosial (Littlejohn, 1992:15).

Di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, terdapat dua pembagian utama, misalnya berdasarkan pokok pembahasannya, yaitu sosiologi makro dan sosiologi mikro. Ada juga yang menyebutkan pembagian antara tata makro (*macro-order*) dan tata mikro (*micro-order*), perspektif struktural atau makrososial dan perspektif kehidupan sehari-hari atau mikrososial, jenjang makro dan jenjang mikro. Dalam konteks makro, ilmu atau teori sosial lebih melihat masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan meletakkan fokus pada saling ketergantungan antara bagian-bagian masyarakat. Di samping itu, perspektif makro lebih memandang hubungan-hubungan antar kelompok, pola-pola organisasi yang komprehensif, serta komunitas-komunitas masyarakat dengan segala masalah yang menyertainya, yakni struktur-struktur institusional. Dalam konteks mikro yang diamati adalah persoalan interaksi-interaksi yang terpola, perilaku peran, tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati, kelompok-kelompok primer dan

hubungan-hubungan antarmanusia dalam kelompok-kelompok terorganisasi serta institusi-institusi (Sunarto, 1985:ix).

Dalam penelitian ini permasalahan atau fokus kajian lebih pada perilaku peran, interaksi antar manusia (individu), serta tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati dalam masyarakat, maka lebih bersifat mikro. Karena itu, pendekatan atau perspektif yang digunakan untuk menelaah permasalahan yang diangkat (seperti dikemukakan di Bab I) sesuai dengan perspektif mikro, dalam hal ini adalah perspektif atau teori interaksionisme simbolik. Pada umumnya setiap perspektif dalam ilmu sosial memiliki kekhasan tersendiri untuk memandang realitas suatu masyarakat. Begitu pula dengan teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh Blumer sebagai bagian dari perkembangan teori dalam tradisi sosiologi Amerika di akhir dasawarsa 1960-an. Teori interaksionisme simbolik pada dasarnya masih berada dalam tradisi kaum behavioris. Akar dari teori interaksionisme simbolik bisa ditelusuri sampai kepada pemikiran-pemikiran psikologi Amerika terutama yang digagas oleh William James, James M. Baldwin, John Dewey dan George Herbert Mead, serta pemikiran-pemikiran sosiologis yang dikedepankan oleh Charles H. Cooley dan William Isaac Thomas (lihat: Blumer, 1969; Collins, 1985; serta Wallace dan Wolf, 1986).

Blumer sendiri dalam mengembangkan teori interaksionisme simbolik banyak dipengaruhi oleh pemikiran psikologi sosial-nya Mead. Kendatipun demikian, seorang Blumer tetap memiliki kekhasan-kekhasan dalam pemikirannya, dan terutama ia mampu membangun suatu teori dalam sosiologi yang berbeda dengan “gurunya”, Mead. Pemikiran Blumer pada akhirnya memiliki pengaruh yang cukup luas dalam berbagai riset sosiologi. Bahkan Blumer pun berhasil mengembangkan teori ini

sampai pada tingkat metode yang cukup rinci. Teori interaksionisme simbolik yang dimaksud Blumer bertumpu pada tiga premis utama:

(1) ...Manusia bertindak terhadap suatu objek berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) ...Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan seseorang dengan orang lain; dan (3) ...Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung digunakan oleh seseorang dalam berhadapan dengan sesuatu yang ditemuinya (Blumer, 1969,2).

Teori interaksionisme simbolik merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata beraksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain (Zeitlin, 1995). Respon aktor secara langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Karena itu, interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain.

Dalam konteks itu, menurut Blumer, aktor akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi di mana ditempatkan dan ke mana arah tindakannya. Sebenarnya, interpretas seharusnya tidak dianggap hanya sebagai penerapan makna-makna yang telah diterapkan, tetapi suatu proses pembentukan di mana makna yang dipakai dan disempurnakan sebagai instrumen bagi pengarah dan pembentukan tindakan.

Selanjutnya, Blumer (1969:80) mengatakan bahwa individu bukan dikelilingi oleh lingkungan objek-objek potensial yang memperlakukannya dan membentuk perilakunya. Gambaran yang benar adalah dia membentuk objek-objek

itu, misalnya berpakaian atau mempersiapkan diri untuk karir profesional-individu sebenarnya sedang merancang objek-objek yang berbeda, memberinya arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan simbol-simbol. Dengan begitu manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui apa disebut Blumer sebagai *self-indication*.

Self-indication adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses *self-indication* ini terjadi dalam konteks sosial di mana individu mencoba "mengantisipasi" tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu. Contoh: pertimbangan dari seorang wanita muda (yang sudah memiliki suami) untuk memenuhi undangan acara makan malam atas rekan pria sekerjanya. Misalnya, dihubungkannya dengan konteks di mana hal itu disampaikan dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang membuat dia bisa menilai masalah dan memberinya makna, kemudian dapat memberikan tanggapan berdasarkan makna itu (Wallace dan Wolf, 1986; serta Poloma, 1984).

Dalam pandangan Blumer (1969:19) yang menonjol atau terjadi dalam interaksi yang berlangsung di masyarakat adalah bahwa proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan bahkan menghancurkan aturan-aturan, bukan sebaliknya aturan-aturan yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok. Bagi Blumer, apa yang disebut sebagai struktur sosial oleh kaum fungsionalisme struktural sesungguhnya adalah hasil interaksi

manusia. Oleh karena itu, mempelajari masyarakat dalam pandangan kaum interaksionisme simbolik, tak lain adalah mempelajari apa yang disebut Blumer sebagai "tindakan bersama". Sementara, masyarakat itu sendiri merupakan produk dari interaksi simbolik. Dalam konteks ini, interaksi manusia dalam masyarakat ditandai atau dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran dan kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain.

Mengikuti hasil kajian Poloma (1984), perspektik interaksionisme simbolik yang disampaikan Blumer mengandung beberapa "*root image*" atau Ide-ide dasar yang dapat diringkas sebagai berikut ini:

(1) Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial; (2) Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi-interaksi non-simbolik mencakup stimulus respons yang sederhana, seperti halnya batuk untuk membersihkan tenggorokan seseorang. Interaksionisme simbolik mencakup "penafsiran tindakan-tindakan"; (3) Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik. Objek-objek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang luas : (a) objek fisik seperti meja, mobil dan sebagainya, (b) objek sosial seperti guru, teman dan sebagainya, (c) objek abstrak seperti nilai-nilai, aturan dan sebagainya; (4) Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai objek; (5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri; (6) Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai

organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia. Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai “kebudayaan” dan “aturan sosial”.

Dalam konteks yang sama, Charon (1979:30-1) mengemukakan secara lebih jelas inti pandangan perspektif interaksionisme simbolik, yakni:

(1) Individu bukanlah kepribadian yang terstruktur dan konsisten, seperti halnya aktor yang selalu berubah dan dinamis yang tidak pernah menjadi apa-apa, tetapi selalu siap menjadi segala sesuatu, terbuka dan bertindak. Individu tidak disosialisasikan, tetapi selalu dalam proses sosialisasi. Individu tidak dibentuk atau baku, tetapi melakukan perubahan secara konstan dalam proses interaksi; (2) Masyarakat dan kelompok tidak dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang statis “di luar sana” yang mempengaruhi, tetapi keseluruhannya merupakan proses interaksi. Masyarakat adalah individu yang berada dalam proses interaksi, yang dinamis dan berubah secara konstan; (3) Ciri individu adalah memiliki pikiran dan dirinya sendiri, dan kedua ciri tersebut merupakan sebuah proses. Orang tidak memiliki “pikiran” sebanyak dia memiliki “proses pemikiran”, mengartikan kemampuan untuk berbicara dengan diri sendiri, kemampuan untuk mengambil rangsangan secara selektif dari alam, memperkirakan kepentingannya, menginterpretasi situasi, menilai tindakan orang lain dan tindakannya sendiri; (4) Manusia memiliki banyak “diri sendiri”, masing-masing berhubungan dalam interaksi di mana dia terlibat, masing-masing berubah secara konstan dalam proses interaksi; dan (5) Kebenaran, ide, sikap dan perspektif, semua dikonseptualisasikan sebagai sebuah proses yang dinilai dan berubah oleh organisme berkaitan dengan apa yang dia amati. Orang tidak dikondisikan untuk

menguji kebenaran mereka. Kebenaran datang melalui interaksi dan juga berpindah dalam proses interaksi.

Pada titik ini dapat dikatakan bahwa meskipun teori interaksionisme simbolik pada dasarnya masih berada dalam tradisi kaum *behavioris*, tetapi teori ini memiliki asumsi kuat bahwa perilaku manusia tidak semata-mata sebagai suatu bentuk atau konstruksi dari aspek psikis/batiniah. Aspek psikis itu sendiri sebagai sesuatu yang dihasilkan dari proses pemberian makna, tetapi juga merupakan proses sosial yang dihasilkan dalam proses interaksi manusia dalam masyarakat. Bagi kaum interaksionis, simbol yang hadir dalam interaksi sosial bukanlah sesuatu yang sudah jadi melainkan sebuah proses menjadi yang bersifat kontinyu. Dalam dunia riset sosiologi, untuk memahami fenomena masyarakat demikian, Blumer (1969) mengetengahkan dua model pengamatan (*inquiry*) yang memungkinkan pengkajian fenomena sosial secara langsung, yaitu penjelajahan dan pemeriksaan.

Tujuan utama pendekatan ini adalah memperoleh gambaran lebih jelas mengenai apa yang sedang terjadi dalam lapangan subjek penelitian. Hasil penjelajahan yang demikian disebut Blumer (1969:147) sebagai “pemetaan konsep” (*sensitifying concepts*), yang menuntut para peneliti dekat dengan apa yang sedang dipelajarinya. Karena melalui cara ini, si pemakai konsep tersebut memperoleh “suatu pengertian umum” (*a general sense of reference*) dan pengarahannya dalam mendekati contoh-contoh empiris. Kedua, melakukan inspeksi (*Inspection*), di mana seorang peneliti harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan data dengan cara menampilkan pembuktian empirisnya.

Charon (1979) menyebutkan pentingnya pemahaman terhadap simbol-simbol ketika seseorang menggunakan teori Interaksi Simbolik. Simbol

merupakan objek sosial (*social object*) dalam suatu interaksi. Ia digunakan sebagai perwakilan dan komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Orang-orang tersebut memberikan arti, menciptakan dan mengubah objek tersebut di dalam interaksi. Simbol sosial tersebut dapat berwujud dalam bentuk objek fisik (berupa benda-benda yang kasat mata), kata-kata (yang digunakan untuk mewakili objek fisik, perasaan, ide-ide, dan lain-lain), serta tindakan (apa pun yang dilakukan orang acap kali memberi arti untuk berkomunikasi dengan orang lain).

Teori Interaksi Simbolik, dalam konteks penelitian ini, diasumsikan sebagai perspektif atau “kacamata” yang tepat dan cukup relevan dalam mencermati status dan peran aktor di balik “praktik kebijakan” penganggaran. Status dan peran yang dimainkan aktor di balik “praktik kebijakan” penganggaran syarat dengan berbagai kepentingan baik terang-terangan maupun tersembunyi yang satu dengan lainnya dalam interaksi tersebut bisa jadi saling berbenturan. Melihat status dan peran strategis individu para aktor di balik “praktik kebijakan” penganggaran menjadi sarat dengan kompromi berbagai kepentingan elit yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat luas dari nilai-nilai humanis.

Penjelasan teoretis yang ingin dibangun (berdasarkan data) mementingkan perspektif, definisi, dan interpretasi partisipasi itu sendiri, maka diperlukan satu pendekatan penelitian tersendiri yang arah dan tujuannya kepada pemahaman terhadap suatu masalah. Pemahaman tersebut berdasarkan perspektif (termasuk definisi dan interpretasi) para pelaku di situs penelitian sesuai dengan arah dan tujuan yang tepat, maka dapat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-interpretif, dengan

menerapkan perspektif teoretis interaksionisme simbolik.

5. SIMPULAN

Penelitian kualitatif diakui sebagai suatu pendekatan alternatif (terhadap pendekatan penelitian kuantitatif-konvensional yang positivistik) untuk bisa memahami fenomena sosial menurut apa yang dipikirkan, diyakini, dan dimengerti oleh para pelakunya. Hal tersebut sejalan dengan paradigma definisi sosial yang memandang tindakan manusia tidaklah mekanistik (sepenuhnya ditentukan oleh struktur), melainkan lebih ditentukan oleh makna atau definisi yang diberikan (kepada sesuatu) oleh para pelakunya.

Paradigma ibarat sebuah jendela yang digunakan untuk mengamati dunia luar dengan wawasannya atau dengan kata lain paradigma digunakan untuk dasar berpijak. Paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberikan makna realitas sosial. Realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan manusia, sehingga kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi yang berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Manusia dalam banyak hal memiliki kesadaran dan kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya, di mana individu berasal. Kesadaran dan kebebasan sebagai individu berkaitan erat dengan lingkungan masyarakat lebih mengarah kepada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif sebagai sebuah realitas sosial mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku manusia, sehingga akan mempengaruhi para pelaku dalam pengambilan keputusan di balik “praktik

kebijakan” penganggaran daerah. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam penentuan paradigma penelitian ilmu sosial. Penentuan paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif.

Secara filosofis, penelitian ini menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik sebagai metodenya. Interaksi simbolik merupakan pendekatan induktif untuk memahami perilaku manusia. Kaum interaksionis percaya bahwa diskripsi mendalam mengenai interaksi sosial seharusnya menjadi tujuan pokok ilmu-ilmu sosial.

Di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, terdapat dua pembagian utama, misalnya berdasarkan pokok pembahasannya, yaitu sosiologi makro dan sosiologi mikro. Dalam penelitian ini permasalahan atau fokus kajian lebih pada perilaku peran, interaksi antar manusia (individu), serta tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati dalam masyarakat, maka lebih bersifat mikro. Karena itu, pendekatan atau perspektif yang digunakan untuk menelaah permasalahan yang diangkat sesuai dengan perspektif mikro, dalam hal ini adalah perspektif atau teori interaksionisme simbolik. Teori Interaksi Simbolik, dalam konteks penelitian ini, diasumsikan sebagai perspektif atau “kacamata” yang tepat dan cukup relevan dalam mencermati status dan peran aktor di balik “praktik kebijakan” penganggaran. Status dan peran yang dimainkan aktor di balik “praktik kebijakan” penganggaran syarat dengan berbagai kepentingan baik terang-terangan maupun tersembunyi yang satu dengan lainnya dalam interaksi tersebut bisa jadi saling berbenturan. Melihat status dan peran strategis individu para aktor di balik “praktik kebijakan” penganggaran menjadi sarat dengan kompromi berbagai kepentingan elit yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat luas dari nilai-nilai humanis.

6. REFERENSI

- Adiprigandani, Siti. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif. Diktat Workshop Metode Riset Kualitatif: Konsep dan Aplikasi*. LSM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Tidak Dipublikasikan.
- Anderson, James. 1969. *Public Policy Making, Second edition: Holt, Rinehart and Winston, New York*.
- Argyris, Chris. 1952. *The Impact of Budgets on People*, Ithaca: School of Business and Public Administration, Cornell University.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism, Perspective and Method*, Englewood Cliff. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Burrell, Gibson and Gareth Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. Ashgate Publishing Company, USA.
- Candy, P. C. 1989. *Alternative Paradigms in Educational Research*. Australian Educational Researcher, Vol. 16.
- Charon, Joel M. 1979. *Symbolic Interactionism: an Introduction, an Interpretation, an Integration*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: prentice Hall, Inc.
- Charon, Joel M. 1995. *Ten Questions, A Sociological Perspective*. Second Edition. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Charon, Joel M. 1998. *Symbolic Interactionism: an Introduction, an Interpretation, an Integration*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: prentice Hall, Inc.
- Charon, Joel M. 1999. *The Meaning of Sociology, A Reader* (ed). Sixth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

- Chua, Wai Fong. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, Vol. LXI. No.4: pp. 601 - 631.
- Collins, Randall. 1985. *Three Sociological Traditions*, New York, Oxford University Press.
- Defleur, Melvin L. 1971. *Sociology: Man in Society*. Glenview, III: Scott, Foresman and Company.
- Etzioni, Amitai. 1988. *The Moral Dimension: Towards a New Economics*. New York: The Free Press.
- Faqih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Insist.
- Freund, Julien. 1969. *The Sociology of Max Weber*. New York: Vintage Books. Waveland Press Inc.
- Gusfield, Joseph R. 1983. *Public Problems as Phenomena: The Shape of a Humanistic Social Science*. Siegwart Lindenberg, James S. Coleman, Stefan Nowak (editor), *Approaches to Social Theory*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hanurawan, Fatah. 2005. *Pendekatan Positivistik, Interpretif dan Kritis dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Seminar UNM.
- Kuhn, Thomas S. 1962. *The Structure of Scientific Revolution*; Peran Paradigma dalam Revolusi Sains. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Linton, Ralph. 1984. *Antropologi: Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, Bandung: Jemmars.
- Littlejohn, Stephen W. 1992. *Theories of Human Communication*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Ludigdo, Unti. 2006. *Sekilas Pengantar untuk Memahami Metode Penelitian Dalam Paradigma Interpretif*. Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Pendekatan Multiparadigma: Breakthrough untuk Transformasi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Mei, 2006.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, Penerbit: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), Surabaya.
- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mead, George Herbert. 1934. *On Social Psychology*. Chicago: The University of Chicago Press. Fourth Impression. 1972.
- Morgan, Gareth. 1980. *Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory*. *Administrative Science Quarterly* 25: 605-22.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nagel, Ernest. 1961. *The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation*. New York: Harcourt, Brace and World, Inc.
- Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Yayasan Solidaritas, Yogyakarta: Gajah Mada.
- Ryan, Bob; Robert W. Scapens and Michael Theobald. 2002. *Research Methods and Methodology in Accounting and Finance*, 2nd Edition. Thomson, London.
- Sarantakos, Sotirios. 1993. *Social Research*. Macmillan Education Australia Pty, Ltd, Melbourne.
- Scapens, Robert W. 1991. *Management Accounting: a Review of Recent Developments*, 2nd Edition. MacMillan, London.
- Scapens, Robert W. and J. Arnold. 1986. *Economics and Management*

- Accounting Research, in Michael Bromwich and Anthony G. Hopwood. 1986. *Research and Current Issues in Management Accounting*. Pitman: pp. 78 - 102, London.
- Shibutani, Tamotsu. 1986. *Social Process*. Berkeley: University of California Press.
- Sunarto, Kumanto. 1985. *Pengantar Sosiologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: YOI.
- Suriasumantri Jujun S. 2003. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Triuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syan'ah*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Triuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syan'ah*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Wallace, Ruth, and Alison Wolf. 1986. *Contemporary Sociological Theory*. Fifth edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Zeitlin, Irving M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta: Gadjahmada university Press.